

Marginalisasi dan Inovasi: Jejak Kebijakan Pendidikan dari Kolonial ke Orde Lama dalam Perkembangan Pendidikan Islam Indonesia

Faisal Amir Toedien^{1*}, Helmiati², Hariza Hasyim³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 16-10-2025
Disetujui: 31-12-2025
Diterbitkan: 31-12-2025

Kata kunci:

Kebijakan Pendidikan
Kolonial
Orde Lama
Pendidikan Islam
Diskriminasi Pendidikan
Modernisasi Madrasah

ABSTRAK

Abstract: This study aims to analyze the dynamics of educational policies during the Colonial and Old Order periods. This study employs a qualitative approach through a library research design, examining a variety of sources such as colonial archives, educational policy documents, legal regulations, and academic literature from books and scholarly journals. The analysis is conducted descriptively and analytically using content analysis and historical approaches to interpret the substance of educational policies, identify ideological patterns, and trace their impacts on Islamic education. Data validity is maintained through literature triangulation and audit trails to ensure the objectivity of interpretations. The findings reveal that colonial educational policies were discriminatory and restricted the space for Islamic education through regulations such as the Teacher Ordinance and the Wild School Ordinance. In contrast, educational policies during the Old Order period reflected initial efforts to integrate Islamic education into the national education system, although it had not yet achieved parity with general education. This study contributes a historical reflection that enriches contemporary discourse on Islamic education policy toward a more inclusive, equitable, and contextual educational system.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan pendidikan pada masa-masa Kolonial dan Orde Lama. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan yang menelaah beragam sumber, seperti arsip kolonial, dokumen kebijakan pendidikan, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik dari buku dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui metode analisis isi dan pendekatan historis untuk menafsirkan isi teks kebijakan pendidikan, mengidentifikasi pola ideologis, dan menelusuri dampaknya terhadap pendidikan Islam. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi pustaka dan audit trail guna memastikan objektivitas hasil interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial bersifat diskriminatif dan membatasi ruang pendidikan Islam melalui regulasi seperti Ordonansi Guru dan Sekolah Liar. Sebaliknya, kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama lebih tergambar adanya upaya untuk mulai mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem nasional yang berlangsung kala itu, meskipun belum sepenuhnya sejajar dengan pendidikan umum. Penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa refleksi historis yang dapat memperkaya wacana kebijakan pendidikan Islam kontemporer menuju sistem yang lebih inklusif, berkeadilan, dan kontekstual.

Alamat Korespondensi:

Faisal Amir Toedien,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
E-mail: 22490114357@students.uin-suska.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik bangsa dan kebijakan negara sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan. Pada masa kolonial Belanda, kebijakan pendidikan diarahkan untuk kepentingan administrasi penjajahan, yang menyebabkan pendidikan Islam mengalami marginalisasi sistemik. Pemerintah kolonial menerapkan sistem pendidikan diskriminatif yang membatasi ruang gerak lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai strategi politik untuk mengukuhkan kekuasaan kolonial dengan menekan pendidikan berbasis keagamaan (Eva Tri Cahyanti, 2021). Berdasarkan hal inilah maka pendidikan Indonesia mengalami kendala dalam perkembangannya kala itu oleh pribumi pun belum ada yang dapat merasakan pendidikan yang mencerdaskan mereka. Setelah kemerdekaan, pendidikan Islam mulai memperoleh pengakuan formal melalui integrasi dalam sistem pendidikan nasional. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh (Fitri dkk., 2025), proses integrasi ini masih menghadapi tantangan dalam standarisasi kurikulum, kapasitas guru, serta penyetaraan antara lembaga pendidikan Islam dan umum. Pada masa Orde Lama, kebijakan pendidikan berorientasi pada pembentukan identitas nasional, tetapi belum sepenuhnya berhasil menempatkan pendidikan Islam dalam posisi yang sejajar dengan pendidikan sekuler. Sementara itu, Orde Baru menandai fase baru dalam birokratisasi pendidikan agama dengan kebijakan yang lebih sentralistik, meskipun mulai membuka ruang bagi modernisasi lembaga Islam.

Dalam konteks global, kajian (Achmad Robith Khusni dkk., 2025) menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di negara-negara Barat seperti Australia dan Belanda bergantung pada kolaborasi antara komunitas Muslim, kebijakan negara, dan penerimaan sosial terhadap nilai-nilai pluralisme. Refleksi ini penting karena Indonesia kini juga menghadapi tantangan serupa: bagaimana mengintegrasikan pendidikan Islam dalam sistem nasional tanpa kehilangan karakter dan nilai-nilainya di tengah arus globalisasi dan kebijakan pendidikan kontemporer. Secara akademik, sejumlah penelitian terdahulu seperti (Haq, 2025) dan (Eva Tri Cahyanti, 2021) telah membahas dinamika kebijakan pendidikan Islam dari masa kolonial hingga reformasi, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan kurang menyoroti aspek transformasi konseptual—yakni bagaimana kebijakan yang lahir dari masa kolonial masih mewariskan bentuk marginalisasi institusional terhadap pendidikan Islam hingga kini. Di sinilah letak *research gap* penelitian ini: perlunya pembacaan historis-kritis terhadap jejak kebijakan kolonial dan Orde Lama untuk memahami akar ketimpangan pendidikan Islam dalam kebijakan modern.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dinamika kebijakan pendidikan pada masa Kolonial dan Orde Lama memengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, serta bagaimana warisan kebijakan tersebut tercermin dalam kebijakan pendidikan kontemporer? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara historis dan konseptual hubungan antara kebijakan pendidikan masa kolonial dan Orde Lama terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, serta mengidentifikasi pola marginalisasi dan inovasi yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kerangka reflektif bagi perumusan kebijakan pendidikan Islam yang lebih inklusif dan kontekstual dalam menghadapi tantangan modernisasi.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kajian sejarah pendidikan Islam Indonesia dengan memberikan analisis intertekstual antara kebijakan kolonial, kebijakan nasional pasca-kemerdekaan, dan kebijakan kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pengelola lembaga pendidikan Islam dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta sebagai bahan evaluasi historis terhadap peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter kebangsaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada penelaahan sumber-sumber tertulis untuk memahami dinamika

kebijakan pendidikan dari masa Kolonial hingga Orde Lama secara konseptual dan historis (Abdurrahman, 2024). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menelaah proses marginalisasi dan inovasi dalam pendidikan Islam melalui kebijakan yang direkam dalam dokumen resmi, arsip kolonial, serta regulasi pendidikan nasional awal kemerdekaan. Jenis penelitian ini termasuk kualitatif dengan pendekatan historis, yang menekankan rekonstruksi realitas kebijakan masa lalu berdasarkan data tertulis. Unit analisis penelitian meliputi periode kebijakan pendidikan Portugis-VOC, Belanda, Jepang, dan Orde Lama, dengan fokus pada kebijakan yang berdampak langsung terhadap posisi pendidikan Islam. Kriteria pemilihan sumber mencakup: (1) dokumen primer seperti *ordonansi guru* dan *peraturan pendidikan kolonial*, (2) arsip peraturan pemerintah Orde Lama, serta (3) literatur sekunder seperti buku sejarah pendidikan dan artikel ilmiah yang relevan.

Data dikumpulkan melalui penelusuran arsip digital, repositori akademik, serta database Garuda dan Moraref untuk menjamin keterlacakan sumber. Seluruh dokumen diseleksi berdasarkan kredibilitas penerbit, relevansi tematik, dan kejelasan konteks historis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh (Rijali, 2018); yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi temuan. Setiap dokumen dikode secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti bentuk diskriminasi pendidikan kolonial, respon lembaga Islam terhadap kebijakan, serta proses integrasi pendidikan Islam dalam masa Orde Lama. Data kemudian direduksi menjadi kategori analitis seperti *marginalisasi*, *resistensi*, dan *inovasi* dalam pendidikan Islam.

Validitas hasil penelitian dijaga melalui triangulasi pustaka dan sumber, sebagaimana diterapkan oleh (Ilhami dkk., 2024). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai sumber (dokumen kolonial, literatur akademik, dan regulasi Orde Lama) untuk memastikan konsistensi interpretasi dan menghindari bias tunggal. Selain itu, dilakukan audit trail berupa pencatatan sistematis seluruh tahapan pengumpulan dan analisis data untuk menjamin transparansi proses penelitian. Sebagai batasan (scope), penelitian ini berfokus pada periode sejarah pendidikan dari masa Portugis hingga Orde Lama (sekitar abad ke-16 hingga 1966). Kajian ini tidak mencakup kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kebijakan pendidikan masa lalu membentuk struktur dan arah pendidikan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Masa Portugis & VOC

Kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai pada abad ke-16, terutama setelah mereka menguasai Malaka pada tahun 1511 dan wilayah Maluku. Portugis melihat pendidikan sebagai alat untuk kristenisasi dan penguatan hegemoni politik-ekonomi. Sekolah-sekolah berbasis misi Katolik didirikan di pusat perdagangan, terutama di Maluku, untuk mendukung konversi agama. Pendidikan ini bersifat diskriminatif karena hanya diberikan kepada anak-anak pribumi yang mau memeluk Katolik (Baker, 2012) sehingga mulai tergambar bahwa pribumi dikesampingkan sejauh-jauhnya terlebih yang beragama Islam kala itu.

Baker juga menekankan bahwa proses evangelisasi di Maluku pada abad ke-16 lebih merupakan hasil dari inisiatif lokal daripada murni usaha kolonial. Meskipun demikian, pendirian sekolah-sekolah misi Katolik di wilayah tersebut tetap berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kontrol kolonial melalui pendidikan. Selain itu, kebijakan pendidikan Portugis pada masa kolonial juga bersifat diskriminatif. Pendidikan formal sangat terbatas dan hanya diberikan kepada kalangan bangsawan, pegawai pemerintah kolonial, serta individu-individu keturunan Eropa atau pribumi yang memiliki status tinggi. Kebijakan ini memperkuat stratifikasi sosial dan memperlebar kesenjangan antara kelompok elit dan rakyat jelata (Sinaga, Aruan, dkk., 2024). Tergambar dari bagaimana Eropa menguasai Nusantara (Indonesia) hingga membuat pribumi begitu diasingkan. Terlepas dari masa Portugis, masuk pula Belanda dengan gencar-gencarnya pengaruh perdagangan oleh VOC.

VOC (1602–1799) melanjutkan model pendidikan kolonial dengan orientasi sedikit berbeda. VOC mendirikan sekolah di Batavia dan kota pelabuhan besar, tetapi tujuan utamanya bukan mencerdaskan masyarakat pribumi, melainkan menyiapkan tenaga administrasi rendahan untuk kepentingan dagang. Pendidikan Islam diabaikan, sehingga pesantren dan surau menjadi benteng utama pendidikan agama serta identitas budaya dan perlawanan terhadap kolonialisme (Daulay & Tobroni, 2017). Pendidikan Islam sama sekali tidak diakomodasi, bahkan cenderung dikesampingkan.

Dalam situasi ini, lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren dan surau menjadi benteng utama pendidikan agama. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai wadah pembentukan identitas dan perlawanan kultural terhadap kolonialisme. Sehingga, meskipun kebijakan Portugis dan VOC bersifat eksklusif dan diskriminatif, dampaknya justru memperkuat konsolidasi pendidikan Islam tradisional (Burhanudin, 2014). Adapun setelah masa ini Belanda mengambil alih lebih besar yang mana pendidikan Islam berkembang dalam tiga bentuk utama. Pertama, pendidikan bercorak peralihan dari tradisi Hindu ke Islam. Kedua, pendidikan yang berlangsung di surau atau langgar. Ketiga, pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan pesantren (Suci Karlina Aziz dkk., 2024). Ketiga perubahan besar ini membuat pendidikan di Indonesia mulai mengarah kepada titik terang baru.

Pendidikan Masa Belanda (Perluasan VOC)

Kebijakan pendidikan kolonial Belanda jauh lebih sistematis. Setelah *Politik Etis* dicanangkan pada tahun 1901, pemerintah kolonial mendirikan *volksschool* (sekolah rakyat) untuk masyarakat pribumi dan juga (sekolah lanjutan) bernama *Vervelgsschool* (Muid dkk., 2024). Namun, sistem ini sangat diskriminatif. Pendidikan dibuat bertingkat dengan sekolah elit (ELS, HBS, AMS) diperuntukkan bagi anak Belanda dan priyayi, sementara sekolah rakyat hanya tiga tahun dengan kurikulum sangat terbatas, tercatat kala itu Belanda mendirikan 122 sekolah (Muid dkk., 2024), ada juga sekolah *Hollands-Inlandshe School* (HIS), yang didirikan pada tahun 1912 kemudian ada sekolah lanjutan kejuruan, seperti *Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA tahun 1900), *School Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA 1900), *Netherlandsch-Indische Artsen School* (NIAS 1914), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) dan lain sebagainya (Hijazi, 2011). Dan beberapa sekolah-sekolah lainnya yang semua dibawah oleh penguasaan dan pantauan Belanda. Selain diskriminasi struktural, Belanda memberlakukan regulasi ketat terhadap pendidikan Islam. Ordonansi Guru (1905, diperbarui 1925) mewajibkan guru agama memperoleh izin resmi dari pemerintah. Ordonansi Sekolah Liar (1932) memperketat pengawasan sekolah nonpemerintah, termasuk madrasah Islam yang dianggap berpotensi memicu perlawanan politik (Moh. Hamzah, 2024). Kebijakan ini menunjukkan upaya sistematis kolonial untuk membatasi ruang gerak pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan dengan dalih sebagai sistem keamanan dan kenyamanan (*rust en orde*). (Lestari, 2022). Namun, nyatanya hal ini tidak lain hanyalah alat untuk melanggengkan kekuasaan kolonial dari berbagai ancaman, salah satunya yaitu Islam dan paham nasionalis

Pemerintah Belanda juga kala itu menetapkan pembatasan yang lebih keras lagi terhadap pendidikan Islam pada tahun 1925, dengan menyatakan bahwa tidak semua orang (kyai) diizinkan untuk mengajar (Hasan dkk., 2023). Namun, represi tersebut memicu munculnya respons kreatif dari kalangan Islam. Muhammadiyah, yang berdiri pada tahun 1912, mengembangkan sistem sekolah modern dengan kurikulum terpadu antara ilmu agama dan umum, sistem kelas, serta metode pengajaran baru Muhammadiyah menjadi pelopor penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia (Nasution & Rahman, 2022). Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) mempertahankan pesantren sebagai basis pendidikan tradisional, tetapi secara bertahap mengadopsi inovasi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan zaman, tercatat sepanjang masa kolonial terdapat 3 lembaga yakni lembaga pendidikan pesantren, islam dan madrasah (Wahid, 2022). Lembaga pendidikannya tetap bertahan sejak masa kolonial menjadi penghalang.

Belanda juga sengaja membangun dikotomi antara pendidikan sekuler (di bawah kontrol pemerintah kolonial) dan pendidikan agama Islam. Kurikulum sekolah umum diarahkan pada ilmu administrasi, bahasa Belanda, dan pengetahuan sekuler, sementara pendidikan Islam ditempatkan di

pinggiran (Irwan dkk., 2024). Dampaknya adalah lahirnya dualisme pendidikan yang diwariskan hingga masa kemerdekaan yang merugikan umat Islam itu sendiri (Slamet Untung, 2013). Dualisme ini dipandang menjadi puncak masalah dalam pendidikan bahkan hingga masa mendatang, yang secara tidak langsung mulai mewabah diberbagai sektoral. Meski demikian, kebijakan kolonial justru memicu lahirnya dinamika baru. Organisasi Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga memodernisasi sistem pendidikannya salah satunya NU dan Muhammadiyah (Rohani dkk., 2022). Dengan demikian, pendidikan kolonial Belanda, meski diskriminatif, memberi katalis bagi perkembangan madrasah modern dan penguatan pesantren. Hal ini terbukti berpengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan Islam kala Jepang dan pascakolonial, dimana hal ini mendorong kesadaran pribumi akan pentingnya pendidikan formal (Rochim dkk., 2025). Pribumi menyadari bahwa hak-hak mereka harus terpenuhi salah satunya mendapatkan pendidikan yang layak dan pula agama yang diyakini secara bebas.

Pendidikan Masa Jepang

Pendudukan Jepang membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Semua sekolah Belanda ditutup, dan sistem pendidikan diganti sepenuhnya dengan kurikulum yang berorientasi Jepang (bertema perang) dengan adanya doktrin *Hakko Ichiu* (kesetiaan kepada Jepang), terbukanya kajian ilmu agama Islam (diberi kelonggaran), Aktivitas militer dan pertanian yang aktif (Rochim dkk., 2025). Semua kebijakan yang dilandasi oleh jiwa perang dan pemujaan Jepang menjadi latar belakang baru kolonialisme pendidikan di Indonesia.

Pada masa Jepang, bahasa Belanda dilarang keras, sementara bahasa Jepang dijadikan bahasa resmi pengantar di sekolah, dengan bahasa Indonesia diperbolehkan pada batas tertentu. Tujuan utama pendidikan adalah menanamkan loyalitas kepada Kaisar Jepang yakni Hirohito, menumbuhkan semangat Asia Timur Raya, dan menyiapkan tenaga kerja untuk mendukung kebutuhan perang. Namun, Setiap siswa diwajibkan menghormati dewa matahari dan menyanyikan *Kimigayo*, tetapi kebijakan ini gagal menumbuhkan loyalitas terhadap Jepang. Sebaliknya, terutama bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam, hal ini dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka, memicu resistensi kultural terhadap pendudukan Jepang (Sinaga, Rumahorbo, dkk., 2024). Umat muslim merasa kebijakan Jepang menyimpang dari syari'at dan ajaran agama, sehingga mendapatkan sambutan yang kurang diterima secara membatin. Meski represif, kebijakan Jepang relatif lebih akomodatif terhadap Islam dibanding Belanda. Jepang menyadari besarnya pengaruh umat Islam di Indonesia dan mencoba merangkul mereka untuk kepentingan mobilisasi politik. Beberapa kebijakan yang menunjukkan akomodasi ini antara lain pengakuan terhadap organisasi politik Islam seperti Masyumi dan pemberian ruang terbatas bagi pengajaran agama di sekolah. Namun, orientasi utamanya tetap pragmatis. (Aiwan & Rehani, 2022), arinya pendidikan Islam hanya difasilitasi sejauh mendukung agenda perang Jepang saja.

Pesantren tetap bertahan di tengah keterbatasan. Jepang bahkan kadang memberikan bantuan simbolis kepada pesantren besar, meski motivasinya politis. Pendidikan Agama Islam (PAI) memang diajarkan di sekolah umum, tetapi hanya sebagai mata pelajaran pelengkap. Fokus utama tetap pada pendidikan militer, disiplin, dan ideologi Jepang. Karena itu, meski terdapat sedikit ruang bagi pendidikan Islam, secara substansi kebijakan Jepang tetap menjadikan sekolah sebagai instrumen politik, bukan sebagai sarana mencerdaskan bangsa (Firmansyah dkk., 2023). Sehingga dapat tergambarkan secara gamblang marginalisasi pendidikan masa colonial rata-rata berfokus pada penguasaan, memperkuat penguasaan, kepentingan politik colonial dan penghancuran pribumi terlebih Islam.

Pendidikan Masa Orde Lama

Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya merumuskan sistem pendidikan nasional yang mandiri dan inklusif. Pada masa Orde Lama, dasar hukum pendidikan ditetapkan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Prabowo & Zulkarnain, 2016), yang kemudian diperkuat dengan UU No. 12 Tahun 1954 (BPK, 1954). Kedua UU ini menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya, serta memberikan ruang bagi integrasi pendidikan agama ke dalam

sistem pendidikan nasional (Khastara Perpunas RI, 2024). Hal ini termaktub jelas dalam sumber-sumber Sejarah yang ada.

Pemerintah pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh presiden Soekarno mulai memberi perhatian terhadap sekolah dan madrasah serta mendapat pengakuan resmi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kala itu (Syarif, 2019). Pendidikan Islam mulai diperbarui melalui kebijakan seperti Madrasah Wajib Belajar (MWB). Upaya ini dilanjutkan pada masa Orde Baru dengan penegerian madrasah (MIN, MTsN, MAN), lahirnya SKB Tiga Menteri yang menyetarakan sekolah dan madrasah, serta pendirian MAPK dan kebijakan lainnya (Sismawati dkk., 2024). SKB Tiga Menteri inilah yang melatar belakangi inovasi baru pendidikan di Indonesia yang lebih memuliakan agama Islam, dengan upaya meluruhkan dikotomi atau dualisme bekas kolonial. Pada masa Orde lama juga ada Sekolah atau Pendidikan Guru Agama Islam (PGA), dan ada pula upaya mengintegrasikan Pendidikan Agama Islam ke dalam sekolah-sekolah negeri (Kosim, 2015; Salsabila dkk., 2021). Perlu digaris bawahi bahwa Setelah masa penjajahan, tujuan pendidikan Indonesia diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme serta membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan siap mengabdikan bagi bangsa (Luthfiyani & Sirozi, 2023). Hal ini menandai awal dari upaya pemerintah untuk mengurangi dikotomi antara sekolah umum dan sekolah agama.

Kurikulum pendidikan juga mengalami perkembangan. Kurikulum 1947, 1952, dan 1964 mencerminkan upaya menggabungkan ilmu umum dan agama. Kurikulum 1947 menekankan pendidikan karakter bangsa; kurikulum 1952 menitikberatkan pada keserasian antara ilmu umum dan agama; sementara kurikulum 1964 berfokus pada pembentukan manusia pembangunan dengan integrasi mata pelajaran agama. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi kendala: keterbatasan guru, fasilitas, serta perbedaan kualitas antar sekolah (Khikamah & Fatimatu Zahro, 2025). Meskipun kita tahu bahwa Kurikulum Pendidikan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan situasi dan kondisi negara tersebut dan khususnya Pendidikan yang ada di Indonesia setelahnya (Lukman & Bahri, 2025). Kurikulum ini juga disinyalir dapat mempertahankan sistem dan kekokohan pendidikan yang diaplikasikan karena bersifat menyesuaikan zaman.

Meski ada kemajuan, pendidikan Islam tetap berada dalam posisi subordinat. Status ijazah madrasah belum sepenuhnya setara dengan sekolah umum, kurikulum madrasah belum terstandardisasi, dan pendanaan masih minim (Maulida Rizqia & Ahmad Dimiyati, 2024). Kondisi ini menciptakan dualisme pendidikan nasional yang bertahan hingga era berikutnya. Dengan demikian, Orde Lama memberikan pengakuan formal dan dasar hukum bagi pendidikan Islam terlebih bagi madrasah dan sekolah beragama, tetapi pelaksanaan kebijakan belum mampu menghapuskan kesenjangan struktural antara pendidikan umum dan pendidikan agama (Delvia dkk., 2025). Warisan ini kemudian menjadi tantangan bagi sistem pendidikan Indonesia di masa-masa berikutnya.

Pendidikan pada masa Orde Lama berusaha melakukan pembaruan, termasuk dalam pendidikan Islam, meskipun situasi politik saat itu banyak dipengaruhi oleh dominasi PKI yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, masa ini akhirnya ditutup dengan lahirnya Orde Baru sebagai koreksi total terhadap kelemahan Orde Lama dan sekaligus membuka babak baru dalam sejarah pendidikan Indonesia (Salsabila dkk., 2021). Orde Baru hadir dengan berbagai macam perubahan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih kongkrit dalam mengatur kebijakan dan eksistensi lembaga pendidikan.

Analisis Implikasi/Dampak Kebijakan-Kebijakan Kolonial Hingga Orde Lama Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

Jika dicermati secara historis, pendidikan di Indonesia sejak masa Portugis hingga Orde Lama memperlihatkan pola yang relatif konsisten: ia dijadikan instrumen politik oleh penguasa. Implikasi dari pola ini terhadap pendidikan Islam tidak sederhana, karena di satu sisi menghasilkan marginalisasi, tetapi di sisi lain melahirkan daya tahan serta inovasi. Pada masa Portugis dan VOC, pendidikan diarahkan untuk kepentingan agama Kristen dan administrasi kolonial, sehingga pendidikan Islam sama sekali tidak mendapat ruang dalam kebijakan resmi. Namun, kondisi ini justru memperkuat posisi pesantren dan surau sebagai lembaga pendidikan alternatif. Dengan kata lain, semakin ditekan oleh

kolonial, semakin kuat pula peran pesantren sebagai simbol perlawanan kultural. Situasi yang hampir serupa terjadi pada masa Belanda. Diskriminasi pendidikan dijalankan melalui stratifikasi sekolah dan regulasi yang menghambat tumbuhnya madrasah. Tetapi, justru dalam kondisi represif tersebut, lahir gerakan modernisasi pendidikan Islam. Muhammadiyah melakukan transformasi model sekolah dengan pendekatan modern, sementara NU memilih memperkuat pesantren sebagai basis tradisi. Dari sini tampak bahwa kebijakan kolonial yang eksklusif tidak sekadar menyingkirkan Islam, melainkan juga memicu kreativitas umat Islam untuk menemukan jalannya sendiri dalam bidang pendidikan.

Masa Jepang menghadirkan dinamika berbeda. Islam mulai diberi ruang, tetapi lebih sebagai alat politik untuk menggalang dukungan rakyat. Implikasinya, pendidikan Islam memang tidak berkembang secara substantif, namun umat Islam memperoleh pengalaman pengakuan politik untuk pertama kalinya, meski masih bersifat pragmatis. Hal ini penting karena menjadi modal kesadaran politik yang kelak berpengaruh pada perjuangan di masa berikutnya. Perubahan signifikan terjadi pada masa Orde Lama. Untuk pertama kalinya negara memberikan pengakuan formal terhadap madrasah, memasukkan Pendidikan Agama Islam ke sekolah negeri, dan meletakkan dasar hukum pendidikan nasional. Namun, pengakuan ini belum sepenuhnya menghapus kesenjangan struktural. Madrasah tetap diposisikan subordinat terhadap sekolah umum, kurikulumnya belum seragam, dan pendanaannya sangat terbatas. Dengan demikian, Orde Lama memang membuka pintu integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem nasional, tetapi pada saat yang sama masih mewariskan dualisme yang bertahan hingga kini.

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Kolonial Vs Orde Lama, Dampak Terhadap Pendidikan Islam

Periode Pemerintahan	Karakter Kebijakan Pendidikan	Dampak terhadap Pendidikan Islam	Respons/Inovasi Umat Islam
Portugis-VOC (1511-1799)	Pendidikan digunakan untuk kristenisasi dan kepentingan dagang	Lembaga Islam (pesantren/surau) dikesampingkan, pendidikan Islam nonformal dan tertutup	Pesantren menjadi basis perlawanan dan pelestarian ajaran Islam
Belanda (1800-1942)	Diskriminatif dan hierarkis; Ordonansi Guru & Sekolah Liar membatasi pendidikan Islam	Pendidikan Islam termarginalisasi secara struktural	Lahirnya Muhammadiyah dan NU; muncul madrasah modern
Jepang (1942-1945)	Akomodatif semu; pendidikan diarahkan untuk perang dan propaganda	Islam diakui terbatas demi kepentingan politik	Penguatan solidaritas dan kesadaran politik umat
Orde Lama (1945-1966)	Upaya integrasi pendidikan agama ke sistem nasional (UU No. 4/1950 dan No. 12/1954)	Pendidikan Islam diakui tetapi tetap subordinat secara status dan pendanaan	Madrasah mulai dilembagakan dan menjadi bagian dari sistem nasional

Jika dibandingkan, kolonialisme Eropa lebih menekan secara terbuka dengan kebijakan diskriminatif, tetapi justru dari tekanan itu lahir kreativitas dan modernisasi pendidikan Islam. Sebaliknya, Orde Lama memberikan ruang akomodatif, tetapi dalam kerangka yang masih diskriminatif secara struktural. Artinya, meskipun negara mulai mengakui pendidikan Islam, pengakuan tersebut bersifat parsial dan tetap menempatkan Islam dalam posisi kedua. Inilah paradoks yang menarik, dimana kolonialisme menekan namun memicu inovasi, sedangkan Orde Lama mengakui namun sekaligus membatasi.

Kolonialisme Eropa, meskipun menekan pendidikan Islam secara terbuka melalui kebijakan diskriminatif, justru melahirkan inovasi kelembagaan dari kalangan Islam sendiri. Tekanan eksternal membuat umat Islam terdorong untuk bertransformasi dari pendidikan tradisional ke sistem madrasah modern. Ini merupakan bentuk *resiliensi sosial dan spiritual* yang menjadi modal bagi modernisasi pendidikan Islam pascakolonial. Sebaliknya, Orde Lama menunjukkan paradoks baru: negara mengakui pendidikan Islam secara formal, namun dalam praktiknya tetap menempatkan madrasah di posisi subordinat. Pengakuan tanpa pemerataan pendanaan, standarisasi kurikulum, dan sertifikasi guru menyebabkan ketimpangan tetap berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa subordinasi ideologis bergeser menjadi subordinasi struktural.

Kedua periode ini memperlihatkan dinamika penting: represi kolonial melahirkan inovasi, sedangkan integrasi nasional tanpa pemerataan melahirkan ketimpangan baru. Maka, sejarah pendidikan Islam di Indonesia adalah kisah tentang perjuangan ganda melawan penjajahan eksternal sekaligus melawan marginalisasi internal. Dari seluruh dinamika tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan kolonial maupun nasional tidak pernah sepenuhnya menguntungkan pendidikan Islam. Justru dalam keterbatasan itulah umat Islam menunjukkan resiliensi, adaptasi, dan inovasi. Pesantren, madrasah, serta organisasi keagamaan berhasil menjaga eksistensi pendidikan Islam meskipun menghadapi tekanan struktural. Dengan demikian, apa yang diwariskan hingga era Orde Lama adalah fondasi yang ambivalen yakni di satu sisi menegaskan posisi subordinat, tetapi di sisi lain menjadi batu pijakan bagi perkembangan pendidikan Islam di era berikutnya.

Pelajaran penting dari sejarah ini relevan untuk kebijakan pendidikan Islam masa kini. Pertama, penting untuk memastikan bahwa integrasi pendidikan Islam dalam kebijakan nasional tidak hanya simbolik, tetapi substantif—melalui pemerataan akses, mutu guru, dan kurikulum yang kontekstual. Kedua, semangat inovasi pada masa kolonial perlu dihidupkan kembali sebagai etos pembaruan pendidikan Islam di era global, misalnya melalui digitalisasi pesantren dan kolaborasi lintas lembaga. Ketiga, refleksi terhadap marginalisasi masa lalu menjadi pijakan moral agar kebijakan modern seperti *Merdeka Belajar* tidak mengulang pola eksklusivitas lama yang menomorduakan lembaga Islam. Dengan demikian, jejak kebijakan pendidikan dari masa kolonial hingga Orde Lama bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga cermin kebijakan masa kini untuk menegakkan sistem pendidikan Islam yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa sejak masa kolonial hingga Orde Lama, pendidikan selalu menjadi alat politik kekuasaan. Kebijakan kolonial yang diskriminatif menempatkan pendidikan Islam dalam posisi termarginalkan melalui pembatasan, pengawasan, dan regulasi seperti *Guru Ordonansi*. Namun, tekanan ini justru melahirkan inovasi dan ketahanan dari dalam komunitas Islam. Pesantren, madrasah, dan organisasi seperti Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama menjadi representasi dari upaya resistensi yang kreatif terhadap kebijakan kolonial yang eksklusif. Pada masa Orde Lama, pendidikan Islam mulai diakui secara formal dalam sistem pendidikan nasional melalui kebijakan integratif yang menandai pergeseran dari marginalisasi menuju pengakuan institusional. Meskipun begitu, kesenjangan dalam hal kurikulum, status kelembagaan, dan dukungan sumber daya masih menjadi warisan panjang dari sistem pendidikan kolonial. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dinamika kebijakan pendidikan dari masa kolonial hingga Orde Lama tidak hanya membentuk arah perkembangan pendidikan Islam, tetapi juga meninggalkan pola marginalisasi dan inovasi yang terus berlanjut hingga era kontemporer.

Implikasinya bagi konteks pendidikan Islam saat ini adalah perlunya pembacaan ulang terhadap sejarah kebijakan pendidikan agar reformasi modern seperti *Merdeka Belajar* tidak mengulang pola eksklusivitas yang sama. Refleksi terhadap jejak kolonial dan kebijakan Orde Lama menjadi penting sebagai fondasi konseptual dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang inklusif, adaptif, dan kontekstual dengan tuntutan zaman. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis studi pustaka (*library research*), sehingga belum mencakup data empiris atau verifikasi lapangan. Oleh

sebab itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan melalui studi arsip kolonial, wawancara dengan pelaku pendidikan, dan analisis kebijakan lintas periode untuk melihat kesinambungan serta perubahan orientasi pendidikan Islam secara lebih komprehensif. Dengan demikian, marginalisasi dan inovasi yang muncul dari jejak kebijakan pendidikan sejak masa kolonial hingga Orde Lama menjadi fondasi historis bagi terbentuknya sistem pendidikan Islam modern di Indonesia yang terus beradaptasi dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat kapasitas internal melalui peningkatan kompetensi pendidik, pengembangan kurikulum yang integratif, serta pengelolaan kelembagaan yang profesional agar tidak terjebak dalam marginalisasi struktural. Pemerintah juga perlu menegaskan prinsip keadilan dalam kebijakan pendidikan dengan memberikan dukungan yang proporsional antara lembaga pendidikan Islam dan sekolah umum, khususnya dalam aspek pendanaan, akreditasi, dan penyetaraan kurikulum. Selain itu, koordinasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus diperkuat agar integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem nasional berjalan efektif tanpa menghilangkan nilai keagamaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam yang berorientasi pada keadilan, inklusivitas, dan penguatan identitas keislaman dalam bingkai kebangsaan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengkaji periode Orde Baru dan Reformasi guna menelusuri kesinambungan transformasi kebijakan pendidikan Islam, serta melakukan studi komparatif dengan negara lain seperti Malaysia atau Mesir untuk memperluas perspektif mengenai model integrasi pendidikan Islam di era modernisasi global.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Achmad Robith Khusni, Ubaidillah, Hepni, & Dyah Nawangsari. (2025). Dinamika Pendidikan Islam di Barat Australia Dan Belanda. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 481–491. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1547>
- Aiwan, A., & Rehani. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(20), 1349–1358.
- Baker, B. C. (2012). *INDIGENOUS-DRIVEN MISSION RECONSTRUCTING RELIGIOUS CHANGE IN SIXTEENTH-CENTURY MALUKU* (Nomor January). The Australian National University.
- BPK, J. (1954). *Database Peraturan UU JDIH Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47953/uu-no-12-tahun-1954>
- Burhanudin, J. (2014). The dutch colonial policy on islam Reading the intellectual journey of Snouck Hurgronje. *AlJami'ah*, 52(1), 25–58. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.25-58>
- Daulay, H. P., & Tobroni. (2017). Islamic Education in Indonesia: A Historical Analysis of Development and Dynamics. *British Journal of Education*, 5(13), 109–126. www.eajournals.org
- Delvia, M., Samad, D., Mamad, F. S., Wahyuni, D., & Sartini, T. (2025). Evolusi Madrasah di Indonesia: Analisis Historis Komparatif terhadap Dinamika Kelembagaan, Kurikulum, dan Pedagogi (1945–2025) Melda. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 23(1), 239–260.
- Eva Tri Cahyanti. (2021). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(2), 181–197. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.47>
- Firmansyah, E., Arifin, S., & Humaidi, M. N. (2023). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum Zaman Jepang. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10446–10453. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3127>
- Fitri, A., Isnaini, K. Y., Ananda, N., Hafiza, S., Antika, R., Sakila, Y., & Fuadi, S. (2025). ISLAM DAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN: ANALISIS TERHADAP SISTEM DAN KURIKULUM. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 1008–1014.

- Haq, I. A. (2025). Pendidikan Islam di Masa Awal Kemerdekaan Indonesia : Peran Sejarah dalam Membentuk Identitas Pendidikan Nasional. *Tarikh : Journal Of Islamic History & Civilization*, 1(2), 118–134.
- Hasan, M., Hasan, S., Anita, Yasir, A., & Basirun. (2023). Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Di Indonesia Zaman Pra Kemerdekaan Masa Kolonial Belanda Dan Jepang. *Al Wildan: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 126–136. <https://doi.org/10.57146/alwildan.v1i3.711>
- Hijazi, H. A. (2011). ISLAMIC EDUCATION in INDONESIA DURING the DUTCH COLONIAL; The Case Muhammadiyah and NU. *Jurnal Madania*, 1(2), 202–224. <https://www.academia.edu/download/89625546/2893.pdf>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., & Afgani, M. W. (2024). Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas Xi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(2), 13–21. <https://doi.org/10.36733/pemantik.v4i2.9412>
- Irwan, Ishomuddin, & Faridi. (2024). Menelusuri Warisan Kebijakan Pendidikan Islam DI MASA KOLONIAL BELANDA. *Fitrah : Jurnal Studi Pendidikan*, 15(2), 118–134.
- Khastara Perpustakaan RI. (2024). KHASTARA. Khazanah Pustaka Nusantara. <https://khastara.perpusnas.go.id/>
- Khikamah, N., & Fatimatuzzahro, I. (2025). QAZI : Journal Of Islamic Studies Analisis Kurikulum Pendidikan Pada Masa Orde Lama. *QAZI" Journal Of Islamic Studies*, 1, 38–45. <https://ejournal.hsnpublisher.id/index.php/qazi>
- Kosim, M. K. (2015). Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 22(1), 1–19. <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i1.550>
- Lestari, D. (2022). Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933). *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 1(01), 7–40. <https://doi.org/10.24090/jsij.v1i1.6644>
- Lukman, C. N., & Bahri. (2025). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 9(3), 168–175.
- Luthfiyanti, A., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Orde Lama. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 38–44. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3450>
- Maulida Rizqia, & Ahmad Dimiyati. (2024). Dynamics of Islamic Education in Indonesia. *Cendekiawan : Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(3), 334–340. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v2i3.219>
- Moh. Hamzah. (2024). Kebijakan Diskriminatif Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam: Studi Kasus Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar. *FAKTA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 18–19.
- Muid, A., Albab, M. U., & Ibad, M. A. (2024). Pendidikan Agama Islam Pada Masa Kolonialisme Belanda di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam*, 13(13), 40–46.
- Nasution, F., & Rahman, A. (2022). the Modernization of Islamic Education in Indonesia: Muhammadiyah Philosophy. *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 1–17.
- Prabowo, G., & Zulkarnain. (2016). *Undang-Undang Pokok Pendidikan Dan Pengajaran (Uupp) No. 4 Tahun 1950 Bagi Pendidikan Di Indonesia 1945-1954*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Rochim, A. S., Mubaraq, Z., & Hady, M. S. (2025). Sejarah Sosial Pendidikan Islam Masa Kolonial Belanda (1602-1942) dan Jepang (1942-1945). *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 240–319. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>
- Rohani, R., Ernita, M., & Salmiah, S. (2022). PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA (Kasus Muhammadiyah Dan NU). *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 18(2), 103–117. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i2.21483>

- Salsabila, S. S., Ichsan, Y., Rohmadani, A. I., & Mahmudah, S. R. (2021). Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi. *Tarbawiy : Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 8–15. <https://doi.org/10.32923/tarbawiy.v8i2.1753>
- Sinaga, R., Aruan, F. F., Charisma, I. F., & Sinaga, Y. S. (2024). Pengaruh Kebijakan Pendidikan Belanda Terhadap Struktur Sosial Lokal. *ARRUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 294–300. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.3999>
- Sinaga, R., Rumahorbo, R. D., Ndruru, S., & Pakpahan, G. (2024). Dampak Pendudukan Jepang Terhadap Kebangkitan Nasionalisme Indonesia. *ARRUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 398–406. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4066>
- Sismawati, Taraki, M., US, K. A., & Sya'roni. (2024). Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 303–315. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.543>
- Slamet Untung, M. (2013). Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren. *Forum Tarbiyah*, 11(9), 1–13.
- Suci Karlina Aziz, Lidin Wiwah Jaya Putra, Kasful Anwar US, & Sya'roni. (2024). Pengaruh Kebijakan Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Keberadaan Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 244–252. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.556>
- Syarif, M. (2019). Kebijakan Pendidikan Orde Lama Dan Dampaknya Terhadap Eksistensi Madrasah. *Inovatif*, 5(2), 1–30.
- Wahid, A. (2022). Eksistensi dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda. *Kewarganegaraan*, 6(3), 4613–4623. <https://journal.upy.ac.id/>